

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Bappeda dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review Rancangan Awal RKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Renstra OPD. Renja suatu OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berlangsung dan kegiatan alternatif atau baru.

Sebagai penjabaran dari perencanaan tahunan dokumen Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD memiliki peran yang penting dalam memberikan arah terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, salah satu evaluasi yang harus dilakukan adalah evaluasi hasil pelaksanaan atas rencana Kerja OPD yang telah disusun sebelumnya. Kriteria penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Dalam hal ini yang di maksud dengan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ihktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran / hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Keberhasilan dari kinerja OPD dapat di lihat dari keberhasilan pencapaian target dari indikator-indikator kinerja yang menjadi tolak ukurnya karena indikator kinerja ini akan tercapai apabila di terjemahkan melalui program dan kegiatan yang akan

mempunyai daya ungkit di dalam pencapaian indikator kinerja OPD. Apabila indikator tersebut tidak tercapai maka perlu di kaji dan di evaluasi kembali apakah program kegiatan yang di rancang sudah sesuai dengan mendukung pencapaian target dan sasaran dari OPD ataukah malah menjadi beban penganggaran dan tidak berkontribusi di dalam pencapaian target dan sasaran dari OPD.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator *input* (masukan) *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil). Berdasarkan pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja Tahun 2018 maka dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang pada tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan Walikota Magelang yang di ukur dari 5 sasaran strategis. Ke lima sasaran strategis tersebut, 2 kinerja sasaran strategis terdapat di dalam misi pertama RPJMD yaitu sasaran terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel dan sasaran Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Adapun kedua sasaran tersebut mempunyai empat indikator kinerja a). Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; b). Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan; c). Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD, dan d).Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga.

Selain dua sasaran tersebut di atas, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di ukur dengan 3 sasaran strategis yang terdapat di dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Magelang Nomor : 050.25/007.c /410 TAHUN 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017-2021. Ketiga sasaran tersebut yaitu: a). Mengoptimal-kan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator dari sasaran ini adalah Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif; b). Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Sasaran ini berindikator Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan; c). Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Sasaran ini mempunyai indikator kinerja sasaran Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas

b. Penjelasan dari capaian lima sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

- Capaian untuk sasaran pertama dapat di lihat dari indikator kinerja sasaran yaitu Persentase capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 90.41% (*Capaian tahun 2017 dari 73 indikator sasaran yang diamanatkan terdapat 66 sasaran yang mencapai target*) dari target yang di tetapkan pada tahun tersebut sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 100.46%. Namun pada tahun **2018** realisasi agak menurun ke angka **74,69 %** (*Capaian tahun 2018 dari 83 indikator sasaran yang di amanatkan terdapat 62 indkator yang tercapai*) dari target yang di tetapkan di awal tahun sebesar **93%**. Dengan realisasi sebesar 74.69% maka capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar **80.31%**. Meski mengalami pelambatan pencapaian target pada tahun 2018 namun demikian beberapa indikator hampir mencapai target dan sisanya adalah perlu upaya keras. Perlu untuk meningkatkan performance OPD yang mengemban dan merealisasikan setiap target pada sasaran dalam RPJMD dan memastikan segala sesuatunya berada pada *track* yang benar. Semakin baik pencapaian sasaran ini maka akan memberikan daya ungkit yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

- Sementara untuk Indikator kedua pada sasaran pertama yaitu indikator *Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan*, Implikasi dari indikator ini melibatkan Profil Daerah (di Bappeda) dan *Data Go* (Dinskominsta). Indikator Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang di dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan di hitung dengan formulasi jumlah publikasi data di bagi dengan jumlah publikasi data yang di butuhkan (di mana data yang di butuhkan ini meliputi data strategis daerah, analisis indakor ekonomi, analisis indikator sosial Kota Magelang, Tabel IO Kota Magelang serta Analisis Ketimpangan Wilayah). Indikator ini dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan Diskomista Kota Magelang.

Realisasi indikator kinerja Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang di dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2018 bila dihitung secara rata-rata dari kedua komponen diatas adalah sebesar **80%** dari target sebesar 70% dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar **114.29%**. Jumlah dan jenis data yang terpublikasi melalui *DataGo* Diskominsta dengan realisasi capaian sebesar 60% dan capaian realisasi untuk jenis data dalam SIPD Kota Magelang sebesar 100% (Data / informasi dan indikator makro yang tersaji dalam Buku Profil Daerah seluruhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan atau capaiannya 100%). Capaian sebesar 60% tersebut dapat di jelaskan di

dalam definisi operasional indikator ini untuk publikasi data yang di butuhkan meliputi 5 data yaitu Data Strategis Daerah, Analisis Indikator Ekonomi, analisis Indikator Sosial Kota Magelang, Tabel IO Kota Magelang dan Analisis Ketimpangan Wilayah, dalam capaian di tahun 2018 dari 5 data yang di butuhkan tersebut baru 3 data yang terpenuhi yaitu Data Strategis Daerah, Analisis Indikator Ekonomi, analisis Indikator Sosial Kota Magelang. Capaian dari indikator ini harus terus ditingkatkan hingga akhir periode RPJMD mengingat data merupakan hal yang sangat vital di dalam pengambilan kebijakan dan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan.

- Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan dipergunakan 2 indikator kinerja. Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya. Indikator sasaran yang pertama yaitu *Prosentase Usulan Masyarakat yang di akomodir dalam APBD* *Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD* mempunyai formulasi perhitungan jumlah usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD di bagi dengan jumlah usulan masyarakat. Berdasarkan data yang di olah, jumlah usulan masyarakat pada tahun 2018 sebanyak **674 usulan**. Dari 674 usulan tersebut yang terakomodir di dalam APBD sebesar **482 usulan**. Apabila di prosentasekan maka jumlah usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD sebesar **71.51%**. Realisasi indikator ini melebihi dari target yang di rencanakan pada tahun 2018 yaitu sebesar 62% bahkan melebihi target pada akhir tahun perencanaan di dokumen RPJMD yang di targetkan sebesar 70%. Adapun capaian kinerja dari indikator pada tahun 2018 sebesar **115.34%**. Kondisi indikator ini pada tahun 2017 sebanyak **634 usulan**. Dari 634 usulan tersebut yang terakomodir di dalam APBD sebesar **445 usulan (70.19%)**.
- Sementara itu untuk indikator kedua dari Sasaran ke dua adalah *Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga* pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% pada tahun 2016. Capaian tahun 2017 jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun tersebut sebanyak **17 OPD (58.62%)**. Berdasarkan data yang di olah, jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun 2018 sebanyak **19 OPD**. Apabila di prosentasekan maka PD yang bermitra dengan Forum Warga sebesar **65.52%** (jumlah OPD yang ada di Kota Magelang sebanyak 29 OPD). Realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target yang di rencanakan pada tahun 2018 yaitu sebesar **65.52%** dengan kata lain mencapai target yang telah di tetapkan di awal perencanaan tahun 2018 sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

- Sasaran Strategis yang ke tiga yaitu *mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunika*s mempunyai satu indikator kinerja yang di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu Cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Indikator Cakupan kualitas perencanaan partisipatif merupakan indikator komposit dari persentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah persentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD ditambah persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah persentase usulan masyarakat di *E- Aspirasi* yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4. Capaian indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif menunjukkan kondisi yang baik. Dari target **57.50%** pada tahun 2018, realisasi indikator kinerjanya sebesar **74.95%**, melebihi dari target yang di rencanakan. Adapun capaian kinerja indikator ini sebesar **130.35%** . Capaian dari indikator – indikator komposit tersebut menunjukkan semakin berkualitasnya perencanaan yang di susun dengan adanya pelibatan dan partisipasi masyarakat yang meningkat sehingga upaya untuk mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- Sasaran strategis yang ke empat adalah "*mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan*". Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja ini di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis serta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari persentase tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD di tambah persentase tingkat keselarasan RPJMD dengan dengan Renstra PD di tambah Prosentase tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD di bagi 3. Capaian sasaran ini dari target sebesar **100%** tercapai sesuai target yaitu **100%**
- sasaran yang ke lima yaitu "*Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas*" mempunyai satu indikator kinerja yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Indikator kinerja ini di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis tersebut. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari persentase implementasi

perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana di tambah persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dibagi 2. Capaian tahun 2018 untuk indikator Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas melebihi target yang di rencanakan. Pada tahun **2018** direncanakan target kinerja sebesar **75%** adapun capaian realisasinya sebesar **76.80%** sehingga capaian kinerja dari indikator tersebut sebesar **102.40%**.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
MISI I : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	93%	74.69%	80.31%
		b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	70%	80%	114.29%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	62%	71.51%	115.34%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	65.52%	65.52%	100%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	57.50%	74.95%	130.35%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	75%	76.80%	102.4%

Sumber : LKJIP Bappeda Kota MagelangTahun 2018, Beppeda,2019

c. Beberapa permasalahan dan solusi atas permasalahan terkait pencapaian beberapa indikator sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagai berikut :

1. **Persentase capaian sasaran pembangunan dlm RPJMD, RKPD, Renstra, Renja**

Beberapa **kendala** yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

- Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
- Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi. Diperlukan berbagai inovasi dan strategi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan percepatan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah di tetapkan pada awal periode perencanaan;
- Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal;
- Masih diperlukannya penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik;
- Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tinggi, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global. Sehingga membutuhkan solusi dengan pendekatan pemikiran dan langkah yang kreatif dan inovatif.

Solusi atas kendala dilakukan melalui:

- Peningkatan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD dapat diwujudkan pada saat penyusunan Rancangan Awal sehingga dapat diintegrasikan lebih dini dalam perencanaan pembangunan daerah. Komunikasi lebih intensif antara Bappeda, Setwan dan DPRD menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut di dukung dengan pemanfaatan IT sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan pokok-pokok pikiran dewan ke dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Evaluasi bersama pihak-pihak terkait hal ini, di level eksekutif integrasi sistem perencanaan dan penganggaran perlu didorong secara penuh untuk pengintegrasian. Komunikasi intensif dengan DPRD juga layak diupayakan.
- Peningkatan pemahaman seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar OPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada RKPD.
- Peningkatan kualitas dan intensitas forum dialog perencanaan, *Focus Group Discussion* serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan.
- Peningkatan *capacity building* di seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar OPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada dokumen perencanaan RKPD. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah. Jika diperlukan ada medium paparan oleh Kepala OPD atas dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan seperti Renja dan Renstra serta Perjanjian Kinerja.
- Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel.
- Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang *out of the box* yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada

2. Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektor yang di manfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan

Beberapa **kendala** yang perlu untuk diantisipasi ke dapan antara lain:

- Belum terintegrasinya basis data sektoral skala kota;
- Belum kuatnya payung hukum pengelolaan data;
- Kurangnya pemahaman akan pentingnya data pada skala kota.
- Masih kurangnya pengelola data yang berkompeten pada setiap Perangkat Daerah sumber data, sehingga data kurang terpelihara dengan

baik yang berdampak pada terhambatnya kelancaran manajemen data daerah;

- Sebagian data belum bisa disajikan secara *realtime* pada saat data tersebut dibutuhkan mengingat beberapa data memerlukan perhitungan, survey ataupun pengelolaan data

Solusi yang dapat dilakukan diantaranya:

- Pembinaan secara komprehensif bagi pengelola data pada setiap OPD;
- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen *DATAGO* yang mengintegrasikan seluruh data sektoral;
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang Satu Data Kota Magelang;
- Sosialisasi tentang pentingnya data kepada stakeholder.
- Melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait dengan pengembangan dan pengelolaan data

3. Indikator Cakupan PD yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga

Beberapa **kendala** yang perlu untuk diantisipasi ke dapan antara lain:

- Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dengan mitra. Hal ini apabila tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah akan berpengaruh pada keberhasilan pembangunan yang mengharapkan adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih perlu dioptimalkan. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan yang di mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan dan pengawasan
- Masih terdapatnya patologi sosial atas keberadaan mitra, dimana persepsi bahwa keberadaan mitra atau kelompok masyarakat yang masih berorientasi mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah
- Belum optimalnya saluran-saluran berbasis teknologi bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya.

Solusi yang dapat dilakukan diantaranya:

- OPD harus semakin intens menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan mitra melalui forum warga.
- Upaya sosialisasi penggunaan saluran-saluran aspirasi masyarakat berbasis teknologi yang ada di Kota Magelang
- Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dan forum-forum warga dan terus memberikan pendidikan tentang pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah
- Bappeda khususnya senantiasa melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, di antaranya dengan menggunakan aplikasi *e- Musrenbang* dan *e-Aspirasi*

- d. Untuk mewujudkan pencapaian indikator RPJMD maka dalam Renstra Bappeda telah di rencanakan program – program dan kegiatan yang nantinya di dukung dengan alokasi anggaran dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang. Pada Tahun anggaran 2018 ini pencapaian indikator kinerja daerah di dilaksanakan oleh 11 program dan 68 kegiatan.
- e. Dari Evaluasi terhadap 11 program yang dilaksanakan pada tahun 2018, keseluruhannya dapat mencapai target program yang telah di rencanakan pada awal tahun perencanaan tampak pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Realisasi 2018	Kinerja RKPD Th.2018
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100%	100%	100%
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90 %	75%	75.14%	100,18%
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85 %	75%	76%	101,33%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55 %	40%	68.66%	171.65%
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	76%	80%	105,26%
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100 %	100 %	100%
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang esosial budayai	100%	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%	100%	100%
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti	4	3	3	100%
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	95%	90%	85.71%	95.23%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Realisasi 2018	Kinerja RKPD Th.2018
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	a. Rasio aparatur perencanaan berdasarkan belakang pendidikan : S1 S2	31% 55%	39% 45%	37.84% 45.95%	97.03% 102.11%
		b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	95%	90%	94.59%	105.1%
		c. Cakupan seminar/ workshop /pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	100%	98%	94.59%	96.52%
		d. cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD	100%	100%	100%	100%

Sumber: Monev Renaksi Triwulan 4 Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

f. Dari evaluasi terhadap 68 (enam puluh delapan) kegiatan yang di laksanakan Bappeda pada tahun 2018 capaian output (fisik) kegiatan secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan yang di laksanakan tahun anggaran 2018 seluruhnya sebesar 100%. Capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan pada tahun 2018 tampak pada tabel di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	Realiasi Fisik Keg
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	7.334.000	7.330.000	99,95%	
1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.334.000	7.330.000	99,95%	100%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	781.748.000	727.199.220	93,02%	
2	Penyediaan jasa surat menyurat	719.000	442.000	61,47%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	Realiasi Fisik Keg
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	106.432.000	83.490.097	78,44%	100%
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.710.000	7.680.325	99,62%	100%
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	143.000.000	142.727.800	99,81%	100%
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	72.494.000	71.757.052	98,98%	100%
7	Penyediaan alat tulis kantor	17.081.000	17.081.000	100,00%	100%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.586.000	18.632.146	86,32%	100%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.250.000	5.239.500	99,80%	100%
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.527.000	3.415.500	96,84%	100%
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.056.000	6.720.000	95,24%	100%
12	Penyediaan bahan logistik kantor	14.981.000	9.554.000	63,77%	100%
13	Penyediaan makanan dan minuman	30.710.000	25.232.800	82,16%	100%
14	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	262.840.000	251.774.824	95,79%	100%
15	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	88.362.000	83.452.176	94,44%	100%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	860.499.000	795.143.450	92,40%	100%
16	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	261.800.000	224.851.500	85,89%	100%
17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.855.000	27.953.500	82,57%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	Realiasi Fisik Keg
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
18	Pengadaan peralatan gedung kantor	44.503.000	41.192.000	92,56%	100%
19	Pengadaan mebeleur	5.325.000	5.275.000	99,06%	100%
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	44.620.000	39.789.500	89,17%	100%
21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	187.720.000	184.116.700	98,08%	100%
22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.676.000	11.185.000	95,79%	100%
23	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70.900.000	62.675.000	88,40%	100%
24	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.500.000	5.209.250	94,71%	100%
25	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	194.600.000	192.896.000	99,12%	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	114.128.000	104.271.500	91,36%	
26	Workshop perencanaan pembangunan daerah	73.248.000	66.679.500	91,03%	100%
27	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	40.880.000	37.592.000	91,96%	100%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	57.341.000	55.977.100	97,62%	
28	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	16.485.000	15.944.000	96,72%	100%
29	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8.500.000	8.311.400	97,78%	100%
30	Penyusunan Rencana Kerja OPD	10.200.000	9.952.000	97,57%	100%
31	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	17.510.000	17.158.700	97,99%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	Realiasi Fisik Keg
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
32	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.646.000	4.611.000	99,25%	100%
	Program Pengembangan data/informasi	109.078.000	99.086.900	90,84%	
33	Penyusunan Profile Daerah	109.078.000	99.086.900	90,84%	100%
	Program Kerjasama Pembangunan	261.665.000	238.969.668	91,33%	
34	Fasilitasi FEDEP	261.665.000	238.969.668	91,33%	100%
	Program perencanaan pembangunan daerah	1.761.448.000	1.641.722.237	93,20%	
35	Penyusunan rancangan RKPd	303.263.000	295.571.500	97,46%	100%
36	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	133.400.000	123.151.600	92,32%	100%
37	Penetapan RKPd	34.855.000	31.857.000	91,40%	100%
38	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	18.871.000	17.454.000	92,49%	100%
39	Forum OPD dan FGD	196.280.000	176.866.500	90,11%	100%
40	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	91.882.000	88.834.375	96,68%	100%
41	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	117.633.000	115.785.000	98,43%	100%
42	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPd	131.425.000	119.794.000	91,15%	100%
43	Penetapan Perubahan RKPd	29.330.000	26.437.000	90,14%	100%
44	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	117.229.000	108.378.500	92,45%	100%
45	Pengendalian dan Evaluasi RKPd	75.000.000	72.307.000	96,41%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	Realiasi Fisik Keg
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
46	Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD	128.374.000	111.533.060	86,88%	100%
47	Penyusunan Standar Satuan Harga	164.075.000	141.055.802	85,97%	100%
48	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	73.500.000	69.016.000	93,90%	100%
49	Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan terhadap Pencapaian Indikator Program	146.331.000	143.680.900	98,19%	100%
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	772.587.000	728.434.543	94,29%	
50	Identifikasi Produk Unggulan Daerah	163.850.000	155.006.500	94,60%	100%
51	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	127.360.000	117.629.643	92,36%	100%
52	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemasaran Produk dan Jaringan Kemitraan	160.700.000	148.612.400	92,48%	100%
53	Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali MKSB	214.077.000	203.475.500	95,05%	100%
	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	0	0	0	<i>Kegiatan di drop pada Perubahn APBD 2018</i>
54	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi	106.600.000	103.710.500	97,29%	100%
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	826.475.000	773.843.400	93,63%	
55	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	160.960.000	148.721.255	92,40%	100%
56	Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	101.134.000	95.871.000	94,80%	100%
57	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	104.000.000	96.808.400	93,09%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	Realiasi Fisik Keg
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
58	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	115.199.000	105.198.395	91,32%	100%
59	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	108.780.000	103.062.200	94,74%	100%
60	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	29.733.000	25.621.700	86,17%	100%
61	Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	101.334.000	97.798.800	96,51%	100%
62	Penyusun Dokumen Masterplan Rencana Induk Pariwisata Kota	105.335.000	100.761.650	95,66%	100%
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	781.733.000	743.817.314	95,15%	
63	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	98.832.000	94.027.500	95,14%	100%
64	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	203.350.000	190.639.500	93,75%	100%
65	Monitoring dan Evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	89.169.000	82.268.500	92,26%	100%
66	Moitoring dan Evaluasi Akses Universal 100-0-100	71.092.000	70.725.592	99,48%	100%
67	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	85.600.000	82.406.000	96,27%	100%
68	Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	233.690.000	223.750.222	95,75%	100%
	Jumlah	6.334.036.000	5.915.795.332	93,40%	

Sumber : Laporan LKPI Bappeda Kota Magelang Tahun 2018, Bappeda, 2019

g. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun **2018** sebesar **Rp. 9.422.191.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.8.874.489.033,-** atau sebesar **94.19%**. Capaian ini lebih baik apabila di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 yang sebesar Rp. 9.078.142.613,-atau sebesar 89.17% ataupun tahun 2016 yang serapannya sebesar 91.32%. Realisasi anggaran pada tahun 2018 merupakan realisasi anggaran yang terbaik dalam 3 tahun terakhir ini. Realisasi anggaran pada tahun 2018 menunjukkan *trend* yang meningkat di semua rekening belanja baik itu belanja tidak langsung ataupun di rekening belanja langsung yang terdiri dari 3 komponen belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa maupun belanja Modal. Realisasi belanja di semua komponen Belanja Langsung maupun belanja tidak langsung, semuanya di atas 90%

**Tabel 2.4 Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018**

Belanja Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran 2018 (Rp)	(%) serapan anggaran 2018
BELANJA DAERAH	9.422.191.000,-	8.874.489.033,-	94.19%
1, Belanja Tidak Langsung	3.088.155.000,-	2.958.693.701,-	95.81%
Belanja Pegawai	3.088.155.000,-	2.958.693.701,-	95.81%
2. Belanja Langsung	6.334.036.000,-	5.915.795.332,-	93.40%
Belanja Pegawai	1.943.128.000,-	1.842.115.500,-	94.80%
Belanja Barang dan Jasa	3.794.408.000,-	3.525.893.832,-	92.92%
Belanja Modal	596.500.000,-	547.786.000,-	91.83%
JUMLAH BELANJA	9.422.191.000,-	8.874.489.033,-	

Sumber :Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Tahun 2018, , data di olah

Secara garis besar dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya:

1. Masih dijumpai kesulitan dan miskordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor, ego dan saling lempar tanggungjawab pada penanganan isu dan permasalahan masih saja terjadi.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi.
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.
4. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan,

masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.

Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang serta langkah ke depan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menghasilkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan maka Bappeda Kota Magelang terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparansi dan akuntabel serta mengutamakan pelibatan masyarakat secara komprehensif;
- b. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), desentralisasi dan demokratisasi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
- c. Penyusunan dokumen - dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan keberlanjutan yang didukung dengan data dan informasi bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian. Serta peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan.
- d. Membuat database dan sistem informasi pembangunan daerah yang mencakup sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis teknologi informatika.
- e. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara *komprehensif* dan terpadu;
- f. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- g. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan;

- h. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.
- i. Melakukan penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
- j. Melakukan pendekatan pemikiran dan langkah yang kreatif dan inovatif untuk menghadapi tantangan pada fungsi perencanaan semakin tinggi, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.
- k. Adapun solusi yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan terkait penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan tersebut di antaranya :
 - melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menopang akuntabilitas dan transparansi atas perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi dapat terkontrol dengan baik dan konsistensi mampu terjaga secara memuaskan. Hal yang sudah dilakukan melalui implementasi integrasi yaitu *e-planning* dan *e-budgeting*, *e-pokir*, *e-monev* dan *e-sakip*
 - Melaksanakan persamaan persepsi terhadap para eselon II dan jajarannya di seluruh OPD agar perencanaan dan pengawalan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dikendalikan secara komprehensif.
 - Terus melakukan upaya peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data atas hasil monitoring evaluasi serta aksesibilitas data yang valid dan tepat waktu
 - Peningkatan kapasitas *core business* perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.
 - Implementasi integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*, *e-pokir*, *e-monev* dan *e-sakip* secara utuh dan konsekuen melibatkan seluruh stakeholders pada setiap fungsi mulai perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi hingga akuntabilitas kinerjanya
 - Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, *Focus Group Discussion* serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan serta adanya kepastian pelimpahan kewenangan antara OPD dan kecamatan/kelurahan
 - Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada Kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah.

- Pemberdayaan para pejabat fungsional perencanaan Bappeda untuk melakukan *roadshow* pencerahan perencanaan ke OPD
- Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel
- Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario *Continuous Improvement* dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2018 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.5 berikut :

TABEL 2.5 ADA DI EXCEL 21-37

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Renja tahun 2020 merupakan tahun ke-empat perencanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang periode 2016 – 2021. Mengingat Renja 2020 yang disusun pada tahun 2019 dengan tetap berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang sudah dilakukan pada tahun 2017 seiring dengan adanya Perubahan SOTK baru di Kota Magelang. Hal tersebut guna menjaga kesinambungan program pemerintah di urusan pembantu perencanaan pembangunan serta untuk mencapai tujuan Magelang sebagai Kota Jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Walikota Magelang. Salah satunya adalah berfokus pada bagaimana menciptakan SDM aparatur yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas .

Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah berperan dalam penyusunan pembangunan makro dan integratif seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD beserta dokumen prasyarat yang dibutuhkan. Setiap tahunnya Bappeda melaksanakan penyusunan dokumen RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan menampung aspirasi kebutuhan masyarakat melalui musrenbang yang dilakukan dari tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Selain penyusunan RKPD, Bappeda juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan terkait isu-isu yang menjadi tema pembangunan Kota Magelang pada tahun terkait.

Tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan oleh OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Walikota Magelang, program dan kegiatan Bappeda Kota Magelang mendukung pada pencapaian misi pertama, *"Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat"*.

Dalam pencapaian misi pertama, sasaran yang akan di capai adalah a). mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel serta b). meningkatkan kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Dalam lima tahun ke depan Bappeda Kota Magelang berupaya untuk mendukung dalam pencapaian kualitas perencanaan pembangunan yang semakin baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat menampung aspirasi kebutuhan riil masyarakat.

Penyusunan Renja 2020 berdasarkan pada RKPD Tahun 2020 yang mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021. Selain itu penyusunan Renja OPD juga berpedoman pada perencanaan jangka panjang Kota Magelang sebagaimana

tertuang di dalam RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai tujuan Magelang sebagai Kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Prioritas pelaksanaan pembangunan di dasarkan pada penyelesaian isu – isu strategis dan tema pembangunan yang telah di susun secara bertahap dalam RPJMD Pemerintah Kota Magelang. Selain itu juga memperhatikan pencapaian indikator kinerja daerah dan indikator kinerja OPD yang telah di tetapkan pada awal tahun perencanaan

Pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2018 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021, yang berarti target dalam Renstra hampir semua tercapai atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.5 yang berisi Rekapitulasi, Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Adapun pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 di EXCEL 40-41

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Terbitnya Undang undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang begitu nyata dalam jalannya pemerintah daerah. Salah satunya adalah perubahan SOTK daerah yang akan mengacu pada urusan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang bukan lagi sebagai pemegang urusan perencanaan pembangunan daerah melainkan sebagai urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan daerah. Hal tersebut memiliki *implikasi logis* diantaranya adalah bergesernya program - program yang selama ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Magelang termasuk diantaranya urusan tata ruang, urusan perumahan dan persampahan akan berpindah menjadi kewenangan perangkat daerah yang mengemban urusan tersebut.

Munculnya SOTK baru yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Magelang nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, memberikan warna yang berbeda pada susunan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Perubahan struktur Organisasi berpengaruh pada beban kerja, kewenangan dan indikator kinerja yang akan di tuangkan di dalam dokumen perencanaan. Terkait dengan perubahan struktur organisasi tersebut, hal yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan perubahan Renstra pada awal tahun 2017. Hal ini menjadi relevan dan *urgens* sehingga memerlukan energi ekstra bagi seluruh personil Bappeda untuk dapat memberikan arah yang benar untuk mendukung pencapaian Visi Misi Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan OPD, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan yaitu RTRW dan RDTRK. Serta perlu dilihat juga sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan ruang, dimana RTRW dijadikan sebagai bahan telaahan dalam penyusunan RPJMD.

Isu SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai kelanjutan paska agenda MDGs yang menjadi isu nasional secara tidak langsung akan mendorong daerah khususnya Kota Magelang untuk mengintervensi kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target MDGs yang ditargetkan tuntas pada tahun 2016. Bappeda sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan di daerah memiliki peran penting dalam perencanaan kegiatan yang mendorong pencapaian target tersebut. Evaluasi terhadap capaian tiap tahunnya juga

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana target yang telah dicapai sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

Beberapa isu baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional yang telah tercover di dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2020 juga harus terkawal baik termasuk dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasinya juga harus mendapatkan alokasi yang proporsional. Isu- isu tentang kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan wilayah serta implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan kelanjutan implementasi *post* MDGs yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga tidak boleh luput dari kawalan perencanaan di tataran Kota Magelang.

Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir Tahun 2015. Setelah tahun 2016 yang merupakan transisi *post* MDGs menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka Proposal SDGs 2015-2030 melibatkan 17 Goals dan 169 indikator. Tujuan - tujuan SDGs harus tercermin di dalam Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang yang tercermin di dalam dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Magelang sebagai wujud kontribusi Pemerintah Kota Magelang terhadap pencapaian target SDGs yang ditargetkan menjadi target nasional. Adapun ke tujuh belas tujuan di dalam SDGs tersebut sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kehidupan yang layak di segala umur.
4. Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil langkah-langkah yang urgen untuk memerangi perubahan iklim dan akibat-akibatnya.

14. Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan, mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

Perencanaan dan pengembangan Kota Magelang juga tidak terlepas dari arah perencanaan wilayah terpadu Kota Magelang sebagaimana sudah ada didalam dokumen RTRW Kota Magelang karena Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari sudut pandang Pengembangan Kewilayahan. Berdasar dokumen Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang Tahun 2015-2020, pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan Kota Magelang. Dalam pengembangan wilayah ada beberapa kepentingan yang harus diakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang, baik kepentingan Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kota Magelang, kepentingan Pemerintah Provinsi, kepentingan daerah kabupaten yang berbatasan yang berdampak pada pengembangan kota, maupun kepentingan daerah yang merupakan perwujudan program kegiatan yang merupakan implementasi dari dokumen-dokumen pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan pendek.

ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah dilaksanakan pada Desember 2015 perlu dilakukan implementasi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Adanya kebebasan arus barang, jasa dan modal memiliki keuntungan dan kerugian tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita. Promosi dan pemasaran produk bisa menjadi sangat luas ketika produk tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dan akan menjadi bumerang ketika produk tersebut tidak mampu bersaing dengan pasar. Jika hal ini terjadi, maka kita akan semakin terpuruk karena kita hanya akan berperilaku konsumtif tanpa memproduksi apapun. Untuk itu diperlukan antisipasi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Kota Magelang telah menyiapkan Rencana Aksi Daerah dalam rangka antisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini tinggal bagaimana implementasi terhadap rencana aksi dimaksud.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan dasar harus tetap berfokus pada penurunan angka kemiskinan, pengurangan

pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pelayanan kesehatan. Terkait dengan isu kemiskinan Kota Magelang yang harus terus di kawal dalam pengentasannya masih sangat strategis untuk dikoordinir perencanaannya. Untuk itu perlu ditinjau kembali dokumen yang sudah ada saat ini untuk dapat dilakukan *review* dan perubahan yang menyesuaikan dinamika kemiskinan Kota Magelang.

Hal lain yang menjadi isu dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pengembangan Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal. Pengembangan kota Cerdas ini berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka penguatan daya saing dan kemandirian daerah, pengembangan Branding Kota Magelang serta upaya untuk menciptakan iklim kondusif yang mendukung peningkatan investasi daerah yang di dukung dengan peningkatan kreativitas dan penguasaan pengetahuan dan teknologi

Jalanan kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Pihak swasta masih menjadi isu yang sejalan dengan Tema Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2017, di mana dengan jalinan kemitraan ini Pemerintah akan mencoba untuk bersama-sama dalam menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan, menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan yang nantinya secara bersama – sama akan mencapai tujuan daerah sebagaimana ada pada dokumen - dokumen perencanaan. Peningkatan peran serta masyarakat menjadi penting serta mewujudkan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan tanpa adanya diskriminasi.

Dalam rangka mencapai misi Kota Religius, penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah menjadi satu hal yang penting mengingat *impact* dari masyarakat religius adalah menurunnya angka kriminalitas serta terciptanya dan terpeliharanya stabilitas daerah, keamanan dan ketertiban. Tujuan akhir dari terciptanya masyarakat religius sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD adalah menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius dan mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman dan nyaman.

Hal lain yang masih menjadi isu sejalan dengan prioritas Nasional maupun prioritas provinsi adalah Penguatan reformasi birokrasi, yang meliputi beberapa bidang di antaranya : a). peningkatan tata kelola pemerintahan; b). pengelolaan aset daerah; c). peningkatan kualitas layanan publik; d). penataan organisasi; e). Penataan tata laksana; f). Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur; g).Penguatan Pengawasan dan h). Penguatan akuntabilitas Kinerja.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di antaranya terkait dengan a). Perlunya pemahaman yang sama di OPD terkait urgensi dan signifikansi perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan meningkatkan

fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang *incremental*; b). Masih dijumpai kesulitan dan miskoordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor, ego dan saling lempar tanggungjawab pada penanganan isu dan permasalahan masih saja terjadi sehingga masih diperlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program; c). Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi, antara lain dengan integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi; d). Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/ telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah dan masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.; e). Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya; dan, f). Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi hasil Renja OPD maupun RKPD sehingga tahapan dan isu permasalahan antara bisa disolusikan bersama OPD dan Bappeda serta implemantasi *e-Monev* untuk kecepatan dan keakuratan serta ketertelusuran progress pelaksanaan Renja maupun RKPD.

Selain hal – hal tersebut di atas, dalam penyusunan dokumen perencanaan ini perlu pula memperhatikan isu – isu regional Propinsi yang berpengaruh terhadap kondisi di daerah dan penanganannya perlu dilakukan melalui program dan kegiatan yang akan di rumuskan di dalam dokumen renja OPD. Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Tengah, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana di sebutkan di dalam dokumen RKPD Kota Magelang tahun 2020, sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu nasional yang juga menjadi isu pembangunan Jawa Tengah tahun 2020. Penduduk Jawa Tengah yang masih berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan bulan Maret 2018 sebanyak 3.897,20 ribu jiwa atas 11,32 persen dan masih berada di atas capaian nasional yaitu sebesar 9,82 persen. Sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah didominasi di wilayah pedesaan sebanyak 2.181,04 ribu jiwa (12,99 persen), sedangkan di perkotaan sebanyak 1.716,16 ribu jiwa (9,73 persen). Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani (buruh petani, petani gurem, dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh nelayan dn nelayan kecil). Kondisi yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah adalah terkait akses pelayanan dasar (*basic needs access*) antara lain akses rumah layak, pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) utamanya pada aspek

kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, ketrampilan, dan produktivitas kelembagaan kelompok masyarakat serta belum baiknya integrasi, sinkronisasi dan tepatnya sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan dan besarnya sumber pembiayaan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pondasi masyarakat miskin yang kokoh, dalam dimensi politik yang lebih luas, dengan menciptakan ruang aspirasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber daya Manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan tahun 2017 IPM Jawa Tengah masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 70,52. Namun demikian angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 70,81. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Isu pendidikan yang penting diperhatikan adalah sistem pendidikan untuk semua dimana setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas serta mampu mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; pendidikan budaya dan karakter; serta pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat.

Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih tinggi dibandingkan usia non produktif. Isu kesehatan juga masih menjadi hal penting. Meskipun angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa, namun angka kesakitan dan angka kematian masih cukup tinggi. Sehingga penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kedepan. Selain itu, ancaman melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi "*ke-bhineka-tunggal-ikaan*", serta adanya kasus kekerasan karena masih adanya paham radikalisme dan terorisme juga menjadi hal yang harus diperhatikan.

3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2017 mencapai angka 5,27 persen, dan sampai dengan triwulan II tahun 2018 telah mencapai angka 5,54 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil, namun kondisi ekonomi global dan regional saat ini tidak dapat diprediksi dengan tepat, sehingga perlu diantisipasi pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian Jawa Tengah kedepan.

Industri pengolahan masih merupakan sektor penyumbang terbesar pada ekonomi Jawa Tengah. Tantangan ke depan adalah penyiapan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi serta antisipasi terhadap ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor.

Dari sektor perdagangan dan jasa perlu diantisipasi persoalan masih tingginya impor dibandingkan ekspor, belum kuatnya daya saing sektor UMKM, serta usaha jasa sektor jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara dari sektor pertanian, persoalan yang masih terjadi adalah makin kurangnya minat angkatan kerja yang menekuni sektor pertanian, dan memilih untuk bekerja di sektor industri serta perdagangan.

4. Keberuntungan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Isu lain yang memerlukan perhatian dan mitigasi adalah penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih; tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan; peningkatan jumlah timbunan sampah; maraknya kegiatan pertambangan tanpa ijin; kerusakan sumber daya pesisir; adanya abrasi dan sedimentasi; serta meningkatnya kejadian bencana tanah longsor, banjir, rob, kebakaran hutan dan kekeringan.

5. Kedaulatan pangan dan energi

Permasalahan yang masih perlu diperhatikan dalam penyediaan pangan diantaranya adalah arus bahan pangan impor semakin terbuka dan tidak dibarengi dengan kebijakan mekanisme pengamanan yang kuat dari pemerintah; sistem distribusi pangan; tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat (ketergantungan pada beras); dan daya saing produk pangan. Adapun isu terkait kedaulatan energi diantaranya ketergantungan terhadap sumber fosil; masih terdapat rumah tangga miskin yang belum berlistrik; serta masih perlunya penggalakan budaya hemat energi di masyarakat.

6. Kesenjangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 ditahun 2016. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, kawasan industri, objek wisata, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa.

7. Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan profesionalisme ASN, dan pengembangan kompetensi SDM aparatur; keterbukaan dan transparansi informasi; pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah berbasis IT; akuntabilitas kinerja, kemandirian

fiskal; serta peningkatan ketahanan ideologi Pancasila, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorism, *hate speech* dan *hoax news* merupakan isu yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan kondusivitas wilayah yang semakin mantap.

Tujuh hal tersebut di atas merupakan isu- isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 yang di amanatkan bagi Kota/Kabupaten di dalam wilayah Jawa Tengah untuk secara bersama – sama berkontribusi dalam memberikan solusi dan penanganan isu dan permasalahan tersebut di atas. Adapun wujud dari kontribusi pemecahan masalah tersebut tercermin di dalam dokumen perencanaan tahunan yang nantinya dari perencanaan tersebut akan di eksekusi oleh OPD – OPD terkait sehingga capaiannya nanti akan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan dan isu – isu strategis Jawa Tengah.

Terkait dengan isu – isu strategis Jawa Tengah, maka arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengan Tahun 2020, diarahkan untuk *“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di dukung kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia”*, dengan prioritas, meliputi:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan menurunkan angka kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, inklusif berbasis potensi unggulan serta mempertahankan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Pemantapan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

Adapun sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengan pada tahun 2020, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi antara 5.4 – 5.8%
- b. PDRB per kapita sebesar Rp. 28.5 juta
- c. Inflasi pada angka 3.0 ± 1
- d. Kemiskinan turun menjadi 9.81%
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4.33%
- f. Indek Pembangunan Manusia sebesar 72
- g. Indeks Gini sebesar 0.34
- h. Indeks pembangunan Gender sebesar 92.25
- i. Indeks Williamson sebesar 0.59

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan di antaranya terkait dengan Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat, perlunya upaya untuk meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan

publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi serta meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi. Pelayanan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung *smart city* dan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih besar pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk pelaksanaan dan pencapaian kinerja atas hal tersebut diatas dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia aparatur perencanaan di Bappeda yang berkualitas dengan kuantitas yang cukup harus disiapkan dengan baik. Oleh karena itu skenario Workshop perencanaan daerah akan tetap menjadi strategis. Selain itu sosialisasi bagi seluruh personil Bappeda dan para Ka Subbag program tentang *update* dan implementasi atas aturan regulasi terkini harus tetap dilaksanakan secara periodik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sumber daya perencanaan di Kota Magelang

Untuk mengawal isu dan *core business* perencanaan tersebut diperlukan skenario peningkatan kapasitas personil perencanaan Bappeda Kota Magelang. Selain itu kebutuhan akan sarana prasarana kantor baik berupa peralatan perlengkapan maupun kantor yang kondusif dan nyaman untuk mendukung kinerja perencanaan juga harus dipertimbangkan untuk direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah salah satu acuan OPD dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang kemudian mereview rancangan awal RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja OPD sudah tercantum semua dalam rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Rancangan awal RKPD pada Bab II Sub Bab Permasalahan Pembangunan, beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan. Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan yaitu:

- a). Perlunya pemahaman yang sama di OPD terkait urgensi dan signifikansi perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan meningkatkan fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang *incremental*;
- b). Masih dijumpai kesulitan dan mis-koordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor, ego dan saling lempar tanggung jawab pada penanganan isu dan permasalahan masih saja terjadi sehingga Masih diperlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program;
- c). Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi, antara lain dengan integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi;
- d). Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/ telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah dan masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.;
- e). Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya;
- f). Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi hasil Renja OPD maupun RKPD sehingga tahapan dan isu permasalahan bisa disolusikan bersama OPD dan Bappeda serta implementasi *e-Monev* untuk kecepatan dan keakuratan serta ketertelusuran progress pelaksanaan Renja maupun RKPD.

Tabel di bawah ini menyajikan review terhadap Rancangan Awal RKPD di mana Rancangan awal tersebut merupakan turunan Program kegiatan yang terdapat di dalam Renstra OPD yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020 di persandingkan dengan hasil analisis kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan renja OPD pada tahun 2020.

tabel 2.7 ada di excel 52-62